



RAPERDA

**Raperda Penanggulangan
Bencana Segera Disahkan**

JOGJA - DPRD Kota Jogja segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanggulangan Bencana menjadi perda. Setelah perda ini ditetapkan, dalam waktu tiga bulan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diharapkan segera terbentuk.

"Dalam dua pekan mendatang raperda ini segera disahkan. Pemerintah sudah setuju dengan raperda tersebut," ujar Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Penanggulangan Bencana Zuhrif Hudaya, kemarin (6/7) *.

Zuhrif menjelaskan, raperda tersebut juga mengatur pembentukan BPBD yang setingkat satuan kerja pelaksana daerah (SKPD). Pembentukannya, tiga bulan dari pengesahan raperda tersebut.

Dalam pembentukan BPBD, pemkot akan menaikkan level Kantor Penanggulangan Kebakaran, Bencana, dan Perlindungan Masyarakat (KPK-BLinmas) atau sering disebut pemadam kebakaran (damkar). Saat ini damkar masih setingkat kantor. Nanti setelah menjadi BPBD, setingkat dengan dinas.

BPBD juga akan memiliki anggaran. Untuk tahun anggaran 2012, anggaran tersebut sudah ada. "Jika sudah terbentuk pada November

2011, DPRD Kota Jogja sudah bisa melakukan pembahasan RAPBD 2012," sambungnya.

Tapi soal anggaran, Zuhrif mewanti-wanti agar tak terlambat atau baru terbentuk 2012. Sebab hal tersebut akan berhubungan dengan anggaran yang baru dibahas pada perubahan yang biasanya dilakukan Agustus atau September. Jika hal tersebut terjadi, bakal mengancam penanganan bencana banjir lahar dingin di Kali Code yang akan memasuki musim penghujan. "Kalau terlambat, berpotensi bencana banjir lahar dingin di Sungai Code tak ada anggaran," tuturnya.

Karena itu, dia menyarankan SDM yang sudah ada di KPK-BLinmas, termasuk kantornya, bisa diberdayakan untuk menjadi BPBD. "Kantor bisa ditingkatkan menjadi badan. Soal kepala, itu syarat eselonnya bisa ditingkatkan," jelasnya.

Sekretaris Kota (Sekkot) Jogja Rapingun mengatakan, pemerintah siap untuk membentuk BPBD dalam waktu tiga bulan. "Jika memang hanya diberi waktu tiga bulan untuk membentuknya, itu sudah cukup. Kami tinggal meningkatkan status dari Kantor KPKBLinmas menjadi BPBD," katanya.

Rapingun yang juga koordinator Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah (BKPBPD) menambahkan, soal pegawai yang akan menempati pos kepala, itu bisa dicarikan. Meski sesuai ketentuan yang berlaku, jabatan BPBD harus setingkat Sekda.

"Saya kira itu bisa dicarikan. Pejabat di lingkungan pemkot ada yang sudah memenuhi klasifikasi tersebut," katanya tanpa menyebutkan siapa saja yang dicalonkan menduduki posisi tersebut. (eri)

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|-----------------------------------|--------------|--------|-----------------|
| 1. Bagian Hukum | Positif | Segera | Untuk Diketahui |
| 2. Kantor Penanggulangan Kebakara | | | |

Yogyakarta, 20 Mei 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005